

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Sistem Akuntansi

Ada berbagai macam definisi mengenai sistem. Berikut ini disajikan beberapa definisi yang berbeda Menurut Romney dan Steinbart dalam jurnal Penda Sudarto Hasugian, Dkk (2017 : 33) “sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasanya terbagi dalam sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar”.

Sedangkan menurut Fery Wongso (2016 : 163) “Sistem adalah kumpulan atau rangkaian komponen-komponen yang saling berhubungan, bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui tiga tahapan input (masuk), proses dan output (keluar)”.

Menurut Sumarsan (2017:1) Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Mulyadi (2016:2), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelola perusahaan.

2.1.2 Sistem dan Prosedur

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Menurut Mulyadi (2016:4) pengertian prosedur adalah sebagai berikut : “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu

department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”.

2.1.3 Sistem Pengeluaran Kas (Pembayaran Klaim Asuransi)

“Pengeluaran kas di dalam perusahaan yang jumlahnya lumayan besar menggunakan cek. Pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil tidak dapat menggunakan cek, melainkan menggunakan dana kas kecil”, (Mulyadi, 2017:425). Kantor Jasa Raharja (Persero) Cabang Malang telah menggunakan sistem informasi pengeluaran kas guna untuk mencatat dan membuat laporan pengeluaran kas ketika mengeluarkan dana / uang tunai.

2.1.4 Asuransi

Dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengemukakan bahwa Asuransi merupakan suatu persetujuan untung-untungan, yakni suatu perbuatan yang hasilnya (untung-ruginya), baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan. Asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat yang memegang polis dan dikenal sebagai tertanggung yang diwajibkan untuk membayar sejumlah premi dalam rangka memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.

2.1.5 Jenis Asuransi

Secara umum asuransi sosial di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :

2.1.5.1 Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

Menurut UU NOMOR 33 TAHUN 1977 No.11 Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat ASTEK, adalah sistim perlindungan yang

dimaksudkan untuk menanggulangi risiko modal yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang meliputi:

1. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) dikelola oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
2. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) Pegawai Perusahaan Swasta dikelola oleh PT. Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja
3. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) dikelola oleh PT. ASABRI

2.1.5.2 Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan Menurut UU No. 3 tahun 1992 Asuransi kesehatan (askes) merupakan asuransi yang obyeknya jiwa. Tujuan asuransi kesehatan adalah memeralihkan risiko biaya sakit dari tertanggung kepada penanggung. Sehingga kewajiban penanggung adalah memberikan biaya atau pelayanan perawatan kesehatan kepada tertanggung apabila sakit. Menurut Sulastomo, Sistem asuransi kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesulitan (ekonomi) dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Ini yang dimaksud asuransi kesehatan sosial.

2.1.5.3 Asuransi Kecelakaan

Yang meliputi Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Raharja. Didalam bukunya Abdulkadir Muhammad, menjelaskan jenis-jenis asuransi sosial sebagai berikut:

1. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep)

Diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, yang mana pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara, dalam hal ini PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

2. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)

Diatur dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang mana pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara, dalam hal ini PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

3. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek)

Diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Badan Penyelenggara sebagai penanggung adalah pemerintah, yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Sosial tenaga kerja (Persero).

4. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspen)

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Badan Penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri sipil adalah PT Taspen (Persero).

5. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI)

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Badan yang ditugasi oleh pemerintah sebagai Penyelenggara Asuransi ABRI (ASABRI) adalah Badan Usaha Milik Negara PT.ASABRI (Persero).

6. Asuransi Sosial Kesehatan (Askes)

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Beserta Keluarganya. Badan Penyelenggara yang disertai tugas adalah PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) atau disingkat PT. Askes Indonesia (Persero).

2.1.6 Tujuan dan Manfaat Asuransi

Tujuan asuransi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan asuransi secara ekonomi dan tujuan asuransi secara hukum. Tujuan secara hukum adalah mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Sedangkan tujuan secara hukum adalah memindahkan resiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain, maksudnya adalah memindahkan resiko suatu kegiatan pihak tertanggung kepada pihak penanggung.

Manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain :

1. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak atas nilai kerugian sebesar pada polis atau perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit

Polis asuransi sering kali dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, jika kita membeli sebuah mobil maka polis asuransi menjadi jaminan tersebut.

4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan.

5. Alat penyebaran risiko

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain).

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Reika Happy Sugiastuti (2017), dengan mengambil judul “Analisis Sistem Dan Prosedur Pembayaran Klaim Kecelakaan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Pt.Jasa Raharja(Persero) Kantor Perwakilan Malang)”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern pada sistem pengeluaran kas dalam upaya meningkatkan pengendalian intern. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses wawancara dengan narasumber, observasi langsung pada objek penelitian, dan dokumentasi pada data sekunder yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan pada PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang sebagian sudah mendukung dalam upaya meningkatkan pengendalian intern, namun ada beberapa yang belum mendukung pengendalian intern dan perlu dilakukan perbaikan, contohnya Pada dokumen yang digunakan, perlu dilakukan perbaikan pada Kwitansi pembayaran klaim kecelakaan belum dibubuhi stempel “Lunas”, pada fungsi yang melakukan pencatatan pada Daftar Harian Kas dan Laporan Pemakaian Bilyet Giro tidak dilakukan oleh Bidang Keuangan, otorisasi tanda tangan di bilyet giro tidak dilakukan oleh Kepala Perwakilan, dan

Perlu ditambahkan dokumen pendukung lagi kepada korban/ahli waris yang dapat memberikan jaminan bahwa pembayaran klaim telah dilakukan dan hak pengaduan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan uang santunan kecelakaan belum masuk ke rekening korban/ahli waris.

2. Penelitian yang dilakukan Fransher, D. (2017), dengan mengambil judul “Analisis Sistem Akuntansi Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntansi kas, sistem pencairan tunai dan tata cara pembayaran Klaim Meninggal Dunia (JKM) yang diajukan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses wawancara dengan narasumber, dokumentasi pada data perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan prosedur pembayaran klaim asuransi kematian yang diterapkan pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado sudah efektif karena telah sesuai dengan teori sistem akuntansi pengeluaran kas, dengan membandingkan sistem akuntansi pengeluaran kas diterapkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado dengan teori sistem akuntansi pengeluaran kas.
3. Penelitian yang dilakukan Jumrah Ria (2018), dengan mngambil judul” Analisis Sistem Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Cabang Makassar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses wawancara dengan narasumber, dokumentasi pada data perusahaan pada saat pelaksanaan wawancara

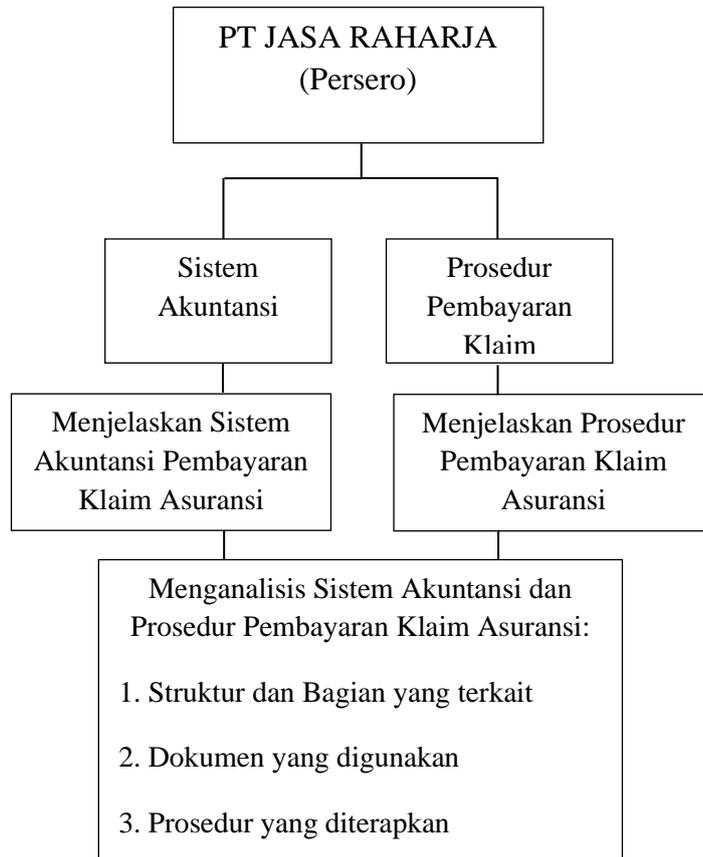
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern pada sistem dan prosedur pembayaran klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sudah berjalan dengan baik dilihat dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan fungsional secara tegas. Sistem wewenang otorisasi dokumen dan prosedur pencatatan sudah memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan perusahaan. Praktik yang sehat telah diterapkan pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Makassar dalam pelaksanaan tugas sesuai wewenangnya tiap-tiap bagian dalam sistem akuntansi pembayaran jaminan. Bpjs Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pihak bank dalam melakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer.

2.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2016) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan. Adapun kerangka konseptual dalam peneitian ini Jurnal Akuntansi dan Keuangan didasarkan pada langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Sistem Akuntansi
2. Menjelaskan Sistem Akuntansi pada perusahaan asuransi
3. Menjelaskan prosedur pembayaran klaim asuransi
4. Menganalisis sistem akuntansi dan prosedur pembayaran klaim asuransi

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1